

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika.2009)
- Arikunti Suharsimi. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, Edisi Revisi V (Jakarta: Rineka Cipta.2002)
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta : Djambatan.2005)
- H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*.(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2011)
- Lexy Maleong. *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.1999)
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.(Jakarta : Ghalia Indonesia.1998)
- Santi Dewi, IGA Gangga. *Penjaminan Tanah dengan Hak Tanggungan di Indonesia*(Semarang : Undip Law Press.2012)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta :UI-Press.1986)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung :Alfabeta.2009)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 2019
. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Hak Tanggungan Elektronik Terintegrasi

C. JURNAL

Hamid S.Attamim. *Peranan Keputusan Presiden Ri dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai
Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengatur dalam
Kurun Waktu Pelita 1-Pelita Vi.* (Jakarta : Disertasi Doktor
Pascasarjana Universitas Indonesia.1990)
Trisadini Prasastinah Usanti.*Lahirnya Kebendaan.* (Surabaya : Jurnal Hukum
Universitas Airlangga.2012)
Sari, I.G.A.D.,Wairocana, I.G.N.,& Resen, M.G.S.K.*Kewenangan Notaris Dan
PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah
Hak Milik.*(Jurnal Hukum Kenotariatan.2018)

- Rizka Muthiadina. *Kedudukan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah Disampaikan oleh PPAT dalam Bentuk Dokumen Elektronik yang Tidak Diikuti Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik oleh Kreditor.*(Jurnal Hukum.Juli 2020.)
- Achmad Chosyali dan Tulus Sartono.*Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah* (Semarang: Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.2016)
- I Wayan Jody Bagus Wiguna. *Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik.*(Jurnal Hukum Kenotariatan. April 2020)
- Jefri Guntoro, Emelia Kontesa dan Herawan Sauni.*Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik.* (Jurnal Ilmu Hukum. November 2020)